

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Malvinas atau Falkland (dalam bahasa Inggris) merupakan sebuah wilayah kepulauan yang berada di Samudera Atlantik dan hanya berjarak sekitar 200 mil dari negara Argentina. Melihat dalam segi geografis, Kepulauan Malvinas ini terletak dan masuk de dalam wilayah perairan dari Amerika Selatan di wilayah selatan Samudera Atlantik. Dilihat secara historis, Kepulauan Malvinas telah menjadi sengketa oleh Argentina dan Inggris sejak abad ke-15. Argentina mengklaim Kepulauan Malvinas didasari oleh kedekatan letak geografis antara Aregentina dengan Kepulauan Malvinas, yang mana Kepulauan Malvinas ini berjarak sejauh 480 km dari daratan Argentina. Argentina beragumen bahwa inggris yang berada di benua Eropa tidak mungkin memiliki wilayah di sekitar benua Amerika. Sehingga Argentina melihat bahwa Kepulauan Malvinas adalah milik darinya dikarenakan letaknya yang berada di benua Amerika. Argentina juga beranggapan bahwa Kepulauan Malvinas merupakan warisan kedaulatan dari pemerintahan Spanyol. Penduduk di kepulauan Malvinas dianggap Argentina bukanlah penduduk asli dari kepulauan tersebut, tetapi penduduk Inggris yang bermigrasi ke Kepulauan Malvinas dikarenakan pemerintah Inggris memindahkannya pada tahun 1833.

Dinamika perebutan status kedaulatan dari Kepulauan Malvinas terjadi sejak sebelum Perang Malvinas pada tahun 1982, yaitu pada masa Imperialisme. Argentina

semakin gencar untuk melakukan klaim terhadap status Kepulauan Malvinas tahun 1982 saat Argentina kalah dalam Perang Malvinas. Perang Malvinas berakhir dengan menyerahnya Argentina pada 14 Juni 1982, setelah proses operasi amfibi Inggris dan operasi darat Inggris selama tiga minggu di Pulau Malvinas Timur. Kepulauan ini kemudian diklasifikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai *non-self governing* yang mana Kepulauan Malvinas ini bertanggung jawab terhadap semua bidang pemerintahan, kecuali hal-hal luar negeri dan pertahanan yang berada dalam pertanggung jawaban pemerintahan Inggris sebagai *self-governing overseas territory* Inggris. Semenjak kalahnya Argentina dalam Perang Malvinas, hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris dalam sengketa Kepulauan Malvinas memasuki kondisi yang fluktuatif hingga terjadinya referendum 2013. Dinamika tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada tahun 1982 - 1989, Kedua pada tahun 1989 - 2003, dan ketiga pada tahun 2003 - 2007. Pada periode pertama, hubungan diplomatik antara Argentina dengan Inggris berada pada level yang sangat buruk dalam hubungan diplomatik bilateral; suatu negara, yaitu terlihat saat kedua negara ini saling melakukan pemutusan hubungan diplomatik bilateral atau pembekuan.

Periode kedua, Argentina dan Inggris mulai melakukan perbaikan hubungan diplomatik bilateral pada periode Carlos Menem. Pada saat itu Argentina dan Inggris melakukan pertemuan pada 19 Oktober 1989, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan kedua negara tersebut di Madrid, Spanyol untuk merundingkan mengenai pemulihan hubungan diplomatik kedua negara yang sempat terputus. Pada periode ini, Argentina dan Inggris sepakat untuk mengesampingkan permasalahan sengketa Kepulauan Malvinas ini

dengan kerangka kedaulatan terhadap persengketaan Kepulauan Malvinas yang disebut dengan *Sovereignty Umbrella* (Dodds, 2012: 699). *Sovereignty Umbrella* berisi: (1) Perlindungan posisi kedua negara dalam sengketa kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas); (2) Pelarangan Tindakan yang berada di luar perjanjian yang dilakukan oleh salah satu negara untuk menegaskan posisi mereka dalam Kepulauan Falkland (Malvinas) (Palermo, 2011).

Sovereignty Umbrella bertujuan sebagai fasilitator komunikasi antara Argentina dengan Inggris tanpa membawa isu kedaulatan Kepulauan Malvinas (Dodds 2012, 699). Dan yang terpenting adalah Argentina tidak diperbolehkan menuntut Inggris untuk melakukan diskusi atau negosiasi mengenai kedaulatan Kepulauan Falkland (Malvinas) (Palermo, 2011). Kemudian kedua negara juga kembali menjalin hubungan diplomatik dengan menunjuk kembali duta besar, membangun komunikasi udara dan maritime, kerjasama sektor ekonomi dan perdagangan (Dodds, 2012). Pembukaan kembali kantor kedutaan kedua negara terjadi pada 26 Februari 1990, saat Inggris menunjuk Sir Humphrey sebagai duta besar Inggris di Argentina dan Mario Campora yang menjadi duta besar Argentina di Inggris. Kantor kedutaan di kedua negara pada 26 Februari 1990, dimana Inggris menunjuk Sir Humphrey Maud sebagai duta besar di Argentina dan Argentina menunjuk Mario Campora untuk menjadi duta besar di Inggris (Dodds, 2012: 699).

Pada periode ketiga, hubungan Argentina dan Inggris kembali menjadi buruk. Hal ini terjadi dikarenakan Argentina pada 2003 yang dipimpin oleh Nestor Kirchner melakukan Tindakan kontroversi dengan kebijakannya yang asertif dimana ia menolak keberadaan *Sovereignty Umbrella*. Kebijakan luar negeri Argentina dibawah

kepemimpinan Nestor Kirchner antara lain: (1) kebijakan luar negeri Argentina difokuskan dalam stabilitas, kemakmuran dan persatuan Amerika Latin; (2) penekanan dalam lingkaran konsentris Mecosur; (3) mengembalikan kepemilikan Malvinas ke Argentina. Kebijakan yang bersifat asertif ini tentu membawa dampak buruk terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Bahkan dalam *the 25th anniversary of the end of the conflict over the islands in the south Atlantic*, Nestor Kirchner terang-terangan berkata bahwa Malvinas adalah bagian dari Argentina dan akan membawa Malvinas kembali ke pangkuan Argentina (BBC, 2007). Kirchner juga menegaskan ke Inggris bahwa Inggris memenangkan perang tersebut dikarenakan bantuan dari kekuatan negara-negara lain, tetapi mereka tidak akan memenangkan tersebut dalam hal keadilan (BBC, 2007). Selain pidato yang sangat kontroversial dan asertif tersebut, juga banyak kebijakan-kebijakan Argentina yang juga menolak *Sovereignty Umbrella*. Pada tahun 2003, Nestor Kirchner menghentikan perizinan penerbangan menuju Kepulauan Malvinas. Hal tersebut ia lakukan untuk membuka kembali isu kedaulatan Kepulauan Malvinas (Dodds, 2012:). Lalu melalui program kebangkitan nasional yang dibuat oleh Kirchner yaitu memperkuat klaim Argentina terhadap Kepulauan Malvinas, Argentina melarang perusahaan-perusahaan tambang asing untuk beroperasi di sekitaran perairan Kepulauan Malvinas (McCan 2012). Selanjutnya pada 2007, Kirchner juga membatalkan secara sepihak perjanjian dengan Inggris perihal membagi hasil dari minyak bumi yang berada di perairan sekitar Kepulauan Malvinas

Selain itu Kirchner juga mengangkat isu ini ke forum internasional dan berusaha mendapatkan dukungan internasional. Salah satunya dengan memanfaatkan kedekatan

Kirchner dengan negara Amerika Latin, salah satunya dengan Brazil. Brazil mendukung Argentina untuk mengklaim Kepulauan Malvinas dan mendukung Inggris melakukan negosiasi ulang dengan Argentina. Hal ini dikarenakan alasan bahwa keberadaan antara Inggris di Malvinas dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Amerika Selatan dan mengkritik PBB yang melegalkan upaya kolonisasi Inggris di wilayah Kepulauan Malvinas. Selanjutnya, Argentina juga membawa isu ini ke forum-forum internasional seperti Organization of American States (OAS) hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Dodds 2012,). OAS pun mendukung Argentina setelah Majelis Umum OAS mendengar presentasi Argentina mengenai Kepulauan Malvinas (MercoPress, 2011). Hal ini kemudian disambut baik dengan deklarasi OAS yang berposisi yang mendukung terwujudnya negosiasi antara Argentina dan Inggris terkait isu Kepulauan Malvinas dalam tempo waktu secepatnya. Selanjutnya Argentina juga meminta PBB untuk mencapuri isu ini. Menteri luar negeri Argentina, Jorge Taiana bertemu Sekretaris PBB, Kofi Annan untuk membantu menyelesaikan kasus ini melalui Komite Khusus Dekolonisasi dan meyakinkan Inggris untuk melakukan negosiasi ulang dan pada akhirnya PBB meminta Argentina dan Inggris untuk memperbarui perjanjian ulang terkait Kepulauan Malvinas (MacAskill, 2006). Bila penulis melihat seluruh Tindakan Argentina tersebut, terdapat perubahan kebijakan yang lebih asertif pada periode kepemimpinan Nestor Kirchner dibandingkan dengan pemimpin Argentina di periode sebelumnya terkait isu sengketa Kepulauan Malvinas.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan Argentina pada isu kedaulatan Kepulauan Malvinasi di periode Nestor Kirchner lebih asertif dibanding periode sebelumnya pasca kalahnya Argentina pada Perang Malvinas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab kebijakan Argentina pada isu kedaulatan Kepulauan Malvinasi di periode Nestor Kirchner lebih asertif dibanding periode sebelumnya pasca kalahnya Argentina pada Perang Malvinas.

1.4 Literatur Review

Dalam tinjauan pustaka ini penulis meninjau mengenai bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah menjadi lebih asertif. Penelitian mengenai hal tersebut tidak terlalu banyak dalam dinamika hubungan internasional sendiri. Dalam konteks hubungan internasional, makna asertif belum menemui kesepakatan bersama (Johnston, 2013: 9). Beberapa mengarah terhadap aktivisme yang konstruktif, dan lain-lainnya menjelaskan sebagai perilaku imperialistic atau nasionalistik. Menurut kamus Meriam-Webster (2018) asertif adalah pernyataan atau perilaku yang percaya diri atau tegas. Dalam konteks hubungan internasional, Johnston (2013:10) melihat asertif sebagai ancaman yang bersifat eksplisit terhadap aktor lain apabila tidak ingin mengalami kerugian yang besar.

Untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah menjadi lebih asertif, penulis menemukan tiga argument dari peneliti-peneliti sebelumnya terkait kasus tersebut. Argumen pertama adalah kebijakan luar negeri suatu negara dapat

berubah menjadi asertif didorong oleh aspek nasionalisme. Dalam Bhattacharya (2014) menjelaskan bahwa nasionalisme negara dapat menjadi sebuah peralatan untuk mendorong kebijakan luar negeri yang asertif, dalam kasus ini dijelaskan dalam negara Tiongkok. Bhattacharya (2014) menjelaskan Nasionalisme Tiongkok didasari oleh dua elemen, yaitu *nation-building* dan pencapaian status *great power*. Kedua elemen ini berakar pada ideologi kekaisaran Tiongkok tentang budaya Konfusianisme. Kebudayaan Konfusianisme ini membentuk akar dari nasionalisme Tiongkok kini dan tujuan kebijakan luar negeri. Hal tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok yang menjadi Perdamaian dengan strategi *non-intervention* dan kebijakan luar negeri non-ideologis (Svensson, 2006). Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas domestik yang menguntungkan Tiongkok itu sendiri. Xinbo (2006) menjelaskan hal tersebut membuat Tiongkok semakin memainkan peran proaktif di dunia internasional, salah satunya ditunjukkan kerjasama Tiongkok dengan negara Amerika Latin dan Afro-Asia Bersatu tanpa adanya intervensi. Kebijakan luar negeri yang asertif tersebut mengarah terhadap pembangunan alternatif *international order* yang menjadi tantangan bagi uniteralisme dan hegemoni Amerika Serikat.

Argumen kedua adalah adanya faktor eksternal terhadap negara itu yang kemudian membuat negara tersebut membuat kebijakan luar negeri yang asertif untuk menanggapi sebab tersebut. Pacequilo (2010) menjelaskan dalam kasus hubungan Brazil dengan Amerika Serikat di periode kepemimpinan Presiden Lula untuk menekan pengaruh dagang Amerika Serikat di regional Amerika Latin. Pada masa pemerintahan Lula da Silva tahun 2003-2010, merupakan masa dimana Brazil sebagai salah satu negara

berkembang yang berpengaruh bagi dunia dengan penerapan *maneuver* yang menjadi dasar karakter Brazil dan perannya dalam sistem internasional. Melalui kebijakan luar negeri yang lebih asertif, Lula da Silva mengaktifkan peran Brazil dalam forum multilateral dengan membawa identitas sebagai representatif dari negara berkembang salah satunya untuk menekan pengaruh dagang Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin. Hornbeck (2006) kemudian menambahkan bahwa implikasi dari kebijakan tersebut adalah dengan integrasi regional Amerika Latin melalui Mercosur dan forum multilateral seperti putara Doha WTO serta menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang untuk melawan FTAA yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan oleh Brazil untuk menciptakan pengembangan kapasitas industri nasionalnya agar Brazil memiliki independensi dalam sistem internasional melalui kebijakan liberalisasi dagang Brazil.

Argumen ketiga mengenai alasan perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara menjadi lebih asertif adalah dikarenakan faktor individu seperti pemimpin. Haugom (2019) kemudian menjelaskannya dalam kasus Turki dibawah kepemimpinan era Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Sejak terpilihnya Erdogan menjadi presiden pada tahun 2014 dan khususnya sejak terjadinya upaya kudeta militer pada 2016, kebijakan luar negeri Turki berubah menjadi lebih asertif. Altunistik (2020) melihat dibawah kepemimpinan Erdogan salah satu fokus yang kuat adalah keamanan nasional yang memang sudah ia serukan bahkan sebelum pemilihan presiden. Haugon (2019) mengatakan dalam regional, Turki menunjukan asertifitas melalui kekuatan militer. Langkah tersebut diekspresikan dalam konsep keamanan negara baru yang dijuluki Doktrin Erdogen. Dalam konsep ini Turki

melakukan kebijakan keamanan proaktif dengan menggunakan kekuatan militer *preemptive* di luar perbatasan dan dapat bertindak secara sepihak bahkan terhadap aliansi Turki. Haugon (2019) menambahkan salah satu implikasinya adalah memproyeksikan pendirian kekuatan militer dengan pangkalan militer di Qatar, Sudan dan Somalia. Alasan dari pendirian pangkalan militer tersebut adalah pengamanan kepentingan nasional Turki di wilayah Benua Afrika dan wilayah Timur Tengah. Qatar merupakan sekutu terdekat dari Turki di kawasan Teluk, sedangkan Somalia dan Sudan adalah sekutu terdekat dan gerbang utama investasi ekonomi Turki di Afrika.

Berdasarkan penjabaran literatur sebelumnya, dapat ditemukan bahwa tiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda dalam menganalisis kasus kebijakan luar negeri Argentina menjadi lebih asertif terhadap isu Kepulauan Malvinas pada era Nestor Kirchner. Penulis melihat argumen pertama dan ketiga dapat menganalisis alasan perbuahan kebijakan Argentina dari segi politik domestik mereka. Sedangkan argumen kedua merupakan kebalikan dari argument pertama dan ketiga dimana peran faktor eksternal dapat mempengaruhi kebijakan Argentina. Penulis melihat bahwa tiga argument di atas memang dapat menganalisa kasus kebijakan Argentina pada isu kedaulatan Kepulauan Malvinasi di periode Nestor Kirchner lebih asertif dibanding periode sebelumnya pasca kalahnya Argentina pada Perang Malvinas dengan hasil yang berbeda-beda. Namun penulis melihat bahwa ketiga argument tersebut belum mampu untuk menjelaskan tujuan dari asertifitas yang dilakukan Argentina pada masa Nestor Kirchner. Dalam kasus ini terdapat poin penting bahwa upaya asertifitas Argentina dikarenakan upaya mereka untuk dapat melakukan negosiasi ulang dengan Inggris terkait sengketa

Kepulauan Malvinas. Maka dari itu penulis akan menggunakan pendekatan negosiasi dalam menganalisis kasus ini. Dalam pendekatan negosiasi terdapat dua teori yakni Distributive dan Integrative. Dalam kasus ini penulis akan menggunakan teori Negosiasi Distributive dikarenakan dalam teori ini satu negosiator lebih memperhatikan keberhasilan dari kepentingan dan keinginan pihaknya saja. Tidak seperti Teori Negosiasi Integrative yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan cara memenuhi keinginan atau kepentingan keduanya tanpa merugikan seluruh pihak yang terlibat, dengan kata lain langkah yang dilakukan adalah memaksimalkan hasil Bersama. Melalui perbedaan dua teori tersebut, Teori Distributive sesuai dengan keinginan Argentina yang menginginkan adanya negosiasi ulang terkait Kepulauan Malvinas dengan tujuan mengklaim kembali pulau tersebut.

1.5 Kerangka Teori

Pada dasarnya, negosiasi dijelaskan oleh Fishen dan Urym (2003) sebagai sebuah proses untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang sedang mengalami sebuah konflik atau tidak kesepakatan. Lebih lanjut, negosiasi juga memiliki beberapa unsur di dalamnya. Pertama mengenai negosiator yang merupakan pelaku dalam melakukan praktik negosiasi, yang mana diwajibkan untuk bersedia menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam proses negosiasi itu sendiri. Kedua, pihak negosiator diwajibkan memiliki kemampuan berargumentasi dengan didukung kemampuan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya adalah pihak yang satu diharuskan dapat kritis pada saat melihat keinginan pihak lainnya dalam bernegosiasi agar tercipta proses yang adil bagi kedua belah pihak. Keempat, pihak negosiator diharuskan dapat memberikan

beberapa pilihan dalam bernegosiasi. Kelima, pihak negosiator diharapkan siap memberikan alternatif apabila tidak ditemukan kesepakatan pada saat bernegosiasi. Terakhir, pada saat negosiator berusaha mempengaruhi pihak lawan tidak diperbolehkan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat provokasi dan negatif (Fisher dan Urym, 2003).

Lebih lanjut mengenai negosiasi, dijelaskan oleh Thompson et al. (2009) bahwa setelah proses negosiasi berlangsung maka akan muncul hasil negosiasi yang mana dalam prosesnya mencakup dua fitur yakni integrative serta distributive negosiasi yang merupakan bagian dari kesepakatan. Merujuk pada tulisan Otomar J. Bartos (1995) bahwa salah satu hal yang dapat membedakan integrative dan distributive negosiasi adalah proses di dalamnya. Dalam proses distributive negosiasi, di dalamnya melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan konsesi serta pencarian alternatif atau jalan keluar yang menguntungkan, yang mana dalam hal ini negosiasi distributive lebih mempersiapkan pihak-pihak di dalamnya untuk pembuatan konsesi. Sedangkan integrative negosiasi dengan kata lain lebih mempersiapkan pihak-pihak di dalamnya untuk terlibat langsung dalam proses pencarian jalan keluar dengan menyatukan berbagai informasi dan pengetahuan yang dimiliki untuk menjadi kesatuan yang utuh, sehingga cenderung mengalami proses yang lebih panjang (Bartos. 1995).

Selain itu, mengenai definisi dari keduanya juga dijelaskan oleh Thompson et al. (2009) bahwa dalam hal ini, integrative dijelaskan sebagai bentuk hasil negosiasi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan cara memenuhi keinginan atau kepentingan keduanya tanpa merugikan seluruh pihak yang terlibat, dengan kata lain

langkah yang dilakukan adalah memaksimalkan hasil bersama (Thompson et al., 2009). Berbeda dengan integrative, negosiasi distributive digambarkan sebagai hasil ketika salah satu negosiator lebih memperhatikan keberhasilan dari kepentingan dan keinginan pihaknya saja, bukan untuk kepentingan seluruh pihak yang bernegosiasi (Thompson et al., 2009). Lebih lanjut mengenai negosiasi distributive, dijelaskan oleh Beersma and De Dreu (2002) bahwa di dalamnya seringkali melibatkan beberapa hal salah satunya adalah klaim kompetitif. Lebih lanjut mengenai negosiasi distributive, bahwa tujuan satu pihak dan pencapaian tujuan tersebut merupakan konflik mendasar dari negosiasi (Dinar, 2000). Dengan kata lain, negosiasi distributive secara langsung dan lebih agresif dalam pencapaian keinginan satu pihak tersebut.

Selanjutnya, Dinar (2000) juga menarik sebuah poin utama yang digunakan oleh negosiasi distributive. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi ini seringkali melihat bahwa negosiasi merupakan sebuah permainan sehingga pendekatan yang digunakan adalah tawar-menawar. Hal ini berbeda dengan negosiasi integrative, yang lebih menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam prosesnya. Lebih lanjut mengenai negosiasi distributive, penggunaan pendekatan tersebut juga berkaitan dengan orientasi pihak-pihak di dalamnya yang mengutamakan sifat kompetitif dan cenderung ingin lebih baik dari pihak lain (Dinar, 2000). Dijelaskan oleh Shlomi Dinar (2000) bahwa pihak yang terlibat dalam proses negosiasi distributive seringkali memiliki perbedaan kepentingan yang memiliki urgensi tinggi. Sehingga, sifat kompetitif itu muncul dan melihat bahwa negosiasi merupakan bentuk tawar menawar. Maka dari itu, negosiasi distributive jauh dari kata kooperatif demi kepentingan bersama untuk penyelesaian

masalah. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi distributive lebih memilih untuk unggul serta memenangkan proses negosiasi dalam mencari jalan keluar suatu masalah (Dinar, 2000).

Dengan kata lain negosiasi distributive disini bukanlah untuk menciptakan situasi win-win solution. Melainkan kemenangan satu pihak. Selain itu, dalam melakukan negosiasi distributive dijelaskan oleh Shonk (2021) setidaknya terdapat empat tahapan yang perlu dipersiapkan. (1) Mempersiapkan dan bekerja untuk meningkatkan alternatif terbaik untuk kesepakatan yang dinegosiasikan atau disebut juga best alternative to a negotiated agreement (BATNA) apabila terjadi situasi dimana tujuan dalam negosiasi tidak tercapai; (2) Menentukan posisi yang ingin dicapai dan menunjukkan komitmen dan keinginan kuat akan berhasilnya negosiasi, sehingga tidak secara mudah beralih ke BATNA; (3) Memahami dan memiliki kemampuan analisa terhadap posisi, tujuan, keinginan, dan BATNA pihak negosiator yang lain; (4) Setelah memahami mengenai posisi dan BATNA, pihak negosiator perlu untuk memutuskan zone of possible agreement (ZOPA). ZOPA disini memiliki makna sebagai *range* atau perkiraan kemungkinan-kemungkinan kesepakatan yang dapat terjadi dan diterima kedua belah pihak (Shonk, 2021).

Dalam proses negosiasi distributive, terdapat pula yang dinamakan bargaining distributive. Pada dasarnya, bargaining sendiri merupakan proses tawar menawar antara pihak yang terkait di dalamnya, dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Dalam proses bargaining juga pihak yang terlibat memiliki penawaran masing-masing, sehingga proses yang dilakukan dua arah, yakni tawar dan menawar. Sehingga, dijelaskan oleh

Dinar (2000) bahwa dalam proses bargaining distributive pihak yang terlibat tentu memiliki perbedaan pendekaran yang digunakan. Perbedaan ini dibutuhkan untuk menciptakan keuntungan dan kepentingannya masing-masing. Dengan kata lain, perbedaan ini disesuaikan dengan keinginan atau pencarian keuntungan tersendiri bagi pihak-pihak tersebut. Sedari awal, proses negosiasi distributive merujuk pada kepentingan perseorangan atau satu pihak saja dan mengabaikan kepentingan bersama. Lebih lanjut dijelaskan juga (dalam Dinar, 2000) bahwa dalam negosiasi distributive ini juga seringkali pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memiliki keyakinan bahwa terhadap sebuah keuntungan atau sumber daya utama yang tersedia dan dapat dikendalikan. Maka dari itu dalam proses negosiasi ini tujuan utama dari pihak-pihak yang terlibat adalah keinginannya untuk menguatkan posisi *bargaining* dan melemahkan kekuatan lawan, posisi tersebut merupakan tujuan dari negosiasi distributive (Dinar, 2000).

Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya tentu terdapat keterkaitan antara penggunaan negosiasi distributive oleh suatu negara sebagai kekuatan tersendiri untuk mencapai kepentingannya. Dijelaskan oleh Greer dan Bendersky (2013) kekuatan bagi suatu negara yang melakukan distributive negosiasi dapat digambarkan melalui sikap dominasi dalam proses negosiasi berlangsung. Dengan penggunaan distributive negosiasi, maka pihak yang terlibat akan cenderung lebih menekan keadaan lawan. Melalui hal tersebut, maka akan terbentuk dengan sendirinya kesan awal antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Hal ini tentu menjadi poin utama dan nilai penting bagi pihak yang melakukan negosiasi (Greer dan Bendersky, 2013). Hal tersebut dikarenakan

dengan mempunyai mempengaruhi kesan awal maka pihak lain ataupun lawan dalam bernegosiasi akan terpecah konsentrasinya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Greer dan Bendersky (2013), seringkali dengan adanya negosiasi distributive yang dilakukan oleh suatu negara maka akan diikuti oleh perilaku maupun sikap asertif yang dominan oleh suatu negara. Hal tersebut dilakukan untuk mencoba mempengaruhi kesan awal pihak lain maupun lawan, sehingga secara tidak langsung akan memecah konsentrasi dan akan menguasai jalannya proses negosiasi itu sendiri.

1.6 Hipotesis

Dari pemaparan diatas dapat diasumsikan Kebijakan Argentina di Era Kirchner terhadap Inggris dalam sengketa Malvinas menunjukkan lebih asertif dibandingkan periode sebelumnya disebabkan oleh upaya Kirchner untuk mengubah posisi Argentina melalui peningkatan *bargaining power* dalam proses negosiasi sengketa Kepulauan Malvinas.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1. Bargaining Power

Slantchev (2005) menjelaskan *Bargaining Power* merupakan sebuah tingkat kemampuan atau keahlian dari suatu aktor untuk mempengaruhi lawannya dengan cara memberi sebuah hal yang bermanfaat bagi kepentingan lawannya. Ketika pihak atau aktor memiliki *bargaining power* yang cukup dapat memenuhi kepentingannya lawannya, maka pihak lawan akan bergerak sesuai yang diinginkan dari pihak tersebut. Adanya perbedaan dari distribusi keuntungan juga berhubungan dengan *bargaining power* yang dimiliki oleh kedua belakha pihak. *Bargaining Power* berguna untuk menentukan dan

mengukur adanya distribusi dari keuntungan yang diterima oleh kedua aktor, Adanya perbedaan dari distribusi keuntungan juga berhubungan dengan *bargaining power* yang dimiliki oleh kedua belakha pihak. Dalam kasus penelitian ini, Dalam kasus ini *bargaining power* ditunjukkan oleh asertifitas kebijakan Argentina saat pemerintahan Nestor Kirchner yang melakukan tindakan kontroversi dengan kebijakannya yang asertif dimana ia menolak keberadaan *Sovereignty Umbrella* untuk meningkatkan *bargaining power* demi menciptakan negosiasi ulang dalam sengketa Kepulauan Malvinas.

1.8 Metodologi

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti adalah tipe penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan antara dua variable ataupun lebih dengan melakukan pengejukan terhadap hipotesis. Tipe penelitian ini menjelaskan suatu situasi atau masalah dalam bentuk hubungan kausal. Tipe penelitian ini juga membantu untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu situasi guna membangun, menjelaskan, memperluas, atau menguji sebuah teori. Tujuan utama penelitian eksplanatif adalah untuk mengidentifikasi isu dan variabel kunci dalam suatu masalah penelitian.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini dimulai saat menjabatnya Nestor Kirchner sebagai Presiden Argentina yaitu pada tahun 2003 hingga akhir masa kepemimpinannya. Namun,

beberapa data dan perilaku juga merujuk pada perilaku masa lampau dari Argentina dalam menangani kasus persengketaan Kepulauan Malvinas.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung hipotesis, maka penulis mengumpulkan data berupa data-data primer ataupun sekunder. Data primer di dapat melalui, dan data sekunder didapat melalui laman berita juga tulisan dari beberapa ilmuwan yang membahas mengenai asertifitas kebijakan Argentina pada masa Nestor Kirchner

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan analisis terhadap data yang berupa informasi yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kebenaran dari hipotesis penulis, sehingga mendapatkan penjelasan. Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis memanfaatkan kerangka pemikiran yang telah disajikan. Kerangka pemikiran digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh untuk membuktikan hipotesis.

1.9 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I adalah bab yang mengandung pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian; Bab II membahas dinamika Isu Sengketa Kepulauan Malvinas (1982-2002); Bab III berisi mengenai Upaya-Upaya Nestor Kirchner dalam

Memperkuat *Bargaining* Argentina dalam Sengketa Kepulauan Malvinas; Bab IV berisi Analisis; Bab V adalah bab yang berisi kesimpulan.